

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sjafrizal (2009), perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan dengan tujuan untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan mempunyai siklus (putaran kegiatan) yang terpola, secara umum terdapat 10 (sepuluh) siklus minimum perencanaan yang perlu dilakukan, yaitu : penilaian keadaan saat ini, penilaian arah pembangunan masa datang, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, mengkaji alternatif strategi pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan, merumuskan kebijakan pembangunan, identifikasi program dan kegiatan, menetapkan perkiraan dana investasi, menetapkan indikator kerja, dan penyusunan rencana tindak (*action plan*).

Pengembangan wilayah merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat. Pengembangan wilayah dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kesuksesan suatu pemerintahan, baik itu daerah maupun pusat. Dari hal tersebut pemerintah daerah maupun pusat menjadikan pengembangan wilayah menjadi strategi dalam meningkatkan kualitas suatu daerah maupun Negara. Suatu pengembangan wilayah perlu adanya perencanaan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan dalam mengembangkan suatu wilayah dilakukan dengan

memahami isu - isu yang terjadi saat ini dan yang akan datang yang kemudian menyusun strategi sesuai dengan tujuan dari pengembangan wilayah.

Kajian perencanaan dan pengembangan wilayah secara umum ditunjang oleh empat pilar pokok, yaitu : 1) evaluasi sumberdaya; 2) aspek ekonomi; 3) aspek kelembagaan; dan 4) aspek lokasi/spasial. Tahap pertama dalam suatu pengembangan wilayah adalah mengidentifikasi sumberdaya yang ada melalui kegiatan evaluasi sumberdaya, baik sumberdaya alami, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya sosial. Evaluasi sumberdaya merupakan proses untuk menduga potensi dan daya dukung sumberdaya berbagai penggunaan. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi suatu dasar bagi tahap - tahap selanjutnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah (Rustiadi, 2009).

Parit Malintang sebagai ibukota baru Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 terbentuk setelah ibukota lama yaitu Pariaman menjadi daerah otonomi berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yaitu Parit Malintang. Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman ke bagian selatan wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu potensi pengembangan daerah baik itu untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri maupun Provinsi Sumatera Barat (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat).

Ibukota kabupaten merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten. Posisi ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan akan memperkuat

peranan suatu kota dalam kedudukan wilayah administrasinya. Kuat pengaruh ini disebabkan adanya kekuasaan yang menjalankan tugas di kota tersebut, sehingga hal – hal yang mempengaruhi kebijakan terhadap wilayah termasuk program pembangunan dipusatkan dilakukan di ibukota.

Pada dasarnya ibukota kabupaten berfungsi kompleks, artinya ibukota dapat merupakan pusat administrasi pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan, pusat jasa serta pusat kebudayaan. Penentuan suatu kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten bermula karena adanya kegiatan - kegiatan ekonomi atau kebudayaan, baru kemudian fungsinya ditambahkan sebagai pusat administratif pemerintahan bagi daerah sekitarnya, dan hal ini merupakan karakteristik umum dari pertumbuhan ibukota suatu wilayah (Mc. Gee, 1976).

Menurut Mc Gee, sebuah ibukota memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat dan pusat pengembangan wilayah sekitarnya. Fungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan sangat didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah tersebut, fungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat didukung oleh ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat, sedangkan fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya dapat dilakukan jika daerah tersebut telah dapat melewati ambang batas pertumbuhan yang mampu menyangga kebutuhan sendiri.

Lokasi ibukota kabupaten sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan wilayah kabupaten. Ibukota Kabupaten sebagai pusat kota pada umumnya merupakan lokasi yang paling strategis tempat berbagai kegiatan fungsional kota terkonsentrasi dengan intensitas tinggi serta merupakan tempat terkonsentrasinya

berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan penduduk yang berskala pelayanan tinggi. Ibukota sebuah kabupaten pada dasarnya mempunyai multifungsi antara lain sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum (Sahar, 2015).

Menurut Glasson dalam Bharata (2003), faktor kedekatan dengan pusat kekuasaan sering menjadi salah satu pertimbangan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan usahanya di wilayah ibukota, dengan alasan memperpendek rentang birokrasi. Fenomena ini berlaku pula di Indonesia, karena keberadaan pemerintahan sangat erat mempengaruhi kondisi perekonomian, termasuk antara penguasa dan pelaku ekonomi. Dengan kondisi tersebut, ibukota akan menyerap sumber daya wilayah sehingga terjadi pemusatan pembangunan di kota tersebut. Sebagai pusat pemerintahan akan berfungsi juga menjadi pusat pertumbuhan, karena kota sebagai pusat pertumbuhan tidak saja merupakan tempat pemusatan fasilitas, namun lebih dari itu kota merupakan pemukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah – wilayah belakangnya.

Posisi geografis Parit Malintang sangat strategis karena memiliki akses jalan darat utama regional Sumatera yang menghubungkan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, juga akses ke bandara udara internasional Minangkabau sebagai jalur transportasi udara dari Kota/Kabupaten yang berada di wilayah utara dalam Provinsi Sumatera Barat seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, dan kota lainnya. Melihat lokasi Parit Malintang yang sangat strategis diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya suatu wilayah untuk mendorong pembangunan

ekonominya, seperti sektor perdagangan dan jasa dalam distribusi produk dan potensi lokal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian yang berjudul “ **Strategi Pengembangan Parit Malintang sebagai Ibukota Kabupaten Padang Pariaman**” penting dilakukan sehingga pembangunan daerah dapat berkembang secara merata.

1.2 Rumusan Masalah

Perpindahan ibukota kabupaten bukan hanya sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan (Purba, 2005).

Permasalahan yang sering terjadi pada kawasan pusat kota yang juga merupakan kawasan pusat pemerintahan adalah tidak terciptanya kawasan pusat kota yang kuat dan konsisten. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi pemerintahan, permasalahan yang timbul adalah terjadinya ketidakteraturan, ketidakefisienan dan tersendatnya proses kegiatan pemerintahan yang akibatnya berdampak pula terhadap masyarakat yang dilayani oleh pemerintah. Demikian pula dengan Kabupaten Padang Pariaman, kondisi yang ada sekarang pada ibukota pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang baru yaitu Parit Malintang, merupakan kawasan pemerintahan yang mendukung kegiatan dan aktivitas pemerintahan daerah, tetapi belum tercipta identitas yang kuat sebagai ibukota pemerintahan. Pusat ibukota Kabupaten Padang Pariaman ini terletak kurang sentries dan berada pada kawasan yang rawan liquifaksi dan longsor. Sarana

pemerintahan yang sudah selesai dibangun dan digunakan yaitu Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan satu gedung perkantoran (Kantor DPPKA Kabupaten Padang Pariaman).

Suatu kota maupun wilayah berkembang karena bekerjanya semua faktor perkembangan yang ada di dalamnya serta adanya pengaruh faktor perkembangan dari luar. Apabila semua faktor ini dibiarkan bekerja dengan cirinya masing – masing, maka mungkin sekali perkembangan kota atau wilayah dapat diperkirakan dengan cara menaksir semua faktor perkembangan. Bila salah satu atau beberapa faktor perkembangan baru, atau ke dalam faktor perkembangan baru, maka arah perkembangannya tentu akan berubah. Pertumbuhan dan perkembangan aktivitas perkotaan, menyebabkan timbulnya kebutuhan akan ruang untuk menampung segala kegiatan yang ada di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan ini dapat bergerak ke arah positif maupun ke arah negatif. Pertumbuhan dan perkembangan ke arah positif, berarti kota atau daerah tersebut semakin berkembang atau maju, sedangkan pertumbuhan yang bergerak ke arah negatif berarti kota atau daerah tersebut tidak berkembang, surut, atau bahkan akhirnya mati.

Untuk itu dirumuskan dua permasalahan yang nantinya diharapkan bisa menjadi kebijakan dalam pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman, yaitu :

1. Apa potensi Parit Malintang sebagaipusat administrasi pemerintahan, pusat pelayanan masyarakatdan pusat pengembangan Kabupaten Padang Pariaman?

2. Bagaimana strategi untuk mendukung pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi Parit Malintang sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat dan pusat pengembangan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Merumuskan strategi pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (masukan) bagi pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang, juga dapat digunakan sebagai bahan kajian / acuan atau pembandingan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pengembangan wilayah sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari sisi penawaran (*supply*). Kajian ini berupa identifikasi dan analisa potensi Parit Malintang sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat dan pusat pengembangan Kabupaten Padang Pariaman untuk merumuskan strategi pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Literatur.

Bagian ini membahas tentang konsep kota pemerintahan, konsep pengembangan wilayah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini diawali dengan kerangka analisis penelitian kemudian memaparkan lokasi penelitian dilanjutkan dengan sumber data dan metode penelitian .

Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung yang terdiri dari aspek fisik dan non fisik.

Bab 5 Analisis Potensi Parit Malintang sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat dan pusat pengembangan Kabupaten Padang Pariaman

Bab ini merupakan hasil penelitian yaitu : identifikasi dan analisa potensisebagai pusat administrasi pemerintahan, identifikasi dan analisa potensi sebagai pusat pelayanan masyarakat, serta identifikasi dan analisa potensi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya.

Bab 6 Strategi Pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman

Bab ini berisikan strategi pengembangan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

Bab 7 Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat berdasarkan temuan studi dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran mengenai hal – hal yang diperlukan.

